

BAB II

GAMBARAN UMUM BUDAYA MALU DAN KEBIASAAN TEPAT WAKTU MASYARAKAT JEPANG

Bab ini membahas secara rinci dan mendalam mengenai budaya malu Jepang dan disiplin tepat waktu di masyarakat Jepang. Pada bab ini juga penulis akan membahas tentang awal budaya malu di Jepang, hal-hal penyebab timbulnya budaya malu serta sejarah tepat waktu di Jepang.

2.1 . Pengertian Budaya Malu

Rasa malu merupakan salah satu dari berbagai perasaan yang ada pada manusia. Malu adalah perasaan ketidaknyamanan akibat merasa telah melakukan pelanggaran terhadap norma-norma sosial, hukum, atau agama, yang dapat menyebabkan penurunan harga diri.

Malu dalam bahasa Jepang disebut “*haji*” (恥) untuk menggambarkan perasaan/pengalaman malu. Budaya malu dalam bahasa Jepang diungkapkan dengan istilah *haji no bunka* (恥の文化). Makna *haji no bunka* dijelaskan dalam 日本大百科全書 (*Nihon Dai Hyakka Zensho*) sebagai berikut:

Shame culture に属している。前者では、悪い行いが人に知られない場合にも自ら罪悪感にさいなまれ、後者では、人前で恥をかかないようにすることが道徳の原動力になるという。モラルの根拠が内にあるか外にあるかの違いである。

Yang artinya:

Kebudayaan “*haji*” adalah bagian dari Shame Culture. Dahulu kelakuan buruk, walaupun dalam situasi tidak diketahui orang, akan menyebabkan timbulnya rasa bersalah pada diri sendiri, tetapi pada saat ini dikatakan bahwa *haji no bunka* merupakan daya penggerak moral agar seseorang tidak mendapatkan *haji* (malu) di muka umum. Dasar moral berbeda

sesuai dengan tempat seseorang, apakah ia berada di dalam atau di luar lingkungannya.

Menurut Ruth Benedict, budaya malu merupakan budaya yang menekankan rasa malu dari reaksi atas kritik atau pandangan orang lain yang akan dijadikan suatu pertimbangan dalam mengatur pola perilaku yang dijadikan suatu hal yang penting. Benedict juga menyatakan bahwa budaya malu menjadi prinsip utama dalam kehidupan orang Jepang dan menjadi landasan moral bagi individu dan masyarakat. (*Pedang Samurai dan Bunga Seruni*:1982).

Takie Sugiyama Lebra, antropolog Jepang, juga meneliti budaya malu dalam kehidupan orang Jepang dalam bukunya yang berjudul "*Japanese Patterns of Behavior*" pada tahun 1976. Lebra menekankan bahwa budaya malu menuntut individu untuk mempertahankan kesopanan dan ketertiban sosial, serta menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Dari beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa budaya malu di Jepang memainkan peran penting dalam membentuk perilaku individu dan masyarakat. Rasa malu menjadi dorongan moral untuk menghindari pengalaman malu di hadapan umum, dan norma-norma budaya terkait dengan rasa malu menjadi panduan dalam interaksi sosial.

2.2 . Budaya Malu Dalam Masyarakat Jepang

Seorang individu dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa lepas dari kebiasaan dan kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Negara Jepang merupakan salah satu negara maju yang memiliki kemajuan pesat di berbagai bidang, namun negara Jepang tetap tidak melupakan kebudayaannya, bahkan mereka selalu melestarikan budayanya sehingga menjadi daya tarik dan juga ciri khas negara tersebut. Salah satu budaya yang cukup melekat dalam masyarakat Jepang adalah budaya malunya. Budaya malu sendiri merupakan salah satu budaya yang paling berpengaruh di Jepang.

Budaya malu memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, karena berfungsi sebagai mekanisme kontrol alami untuk menghindarkan perilaku yang melanggar hukum, aturan, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Tingginya budaya malu dalam suatu kelompok masyarakat erat kaitannya dengan tingkat kemajuan peradaban, karena budaya malu mendorong kualitas keberadaban yang lebih baik. Kehadiran budaya malu membantu menciptakan kehidupan yang lebih teratur, karena rasa malu mendorong orang untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dihormati dalam masyarakat. Energi positif yang dihasilkan dari budaya malu berperan dalam menjaga berbagai aspek kehidupan agar berjalan dengan baik, hingga akhirnya membawa dampak pada terciptanya kehidupan yang sejahtera dan damai.

Ruth Benedict (1982), dalam buku yang berjudul *Pedang Samurai dan Bunga Seruni* menyatakan bahwa masyarakat Jepang adalah masyarakat yang mendasarkan kebudayaannya atas rasa malu. Dikatakan di dalam bukunya, bahwa rasa malu sebagai sanksi utama dalam semua perbuatan. Masyarakat Jepang dikendalikan oleh budaya malu yang merupakan suatu reaksi psikologis yang timbul terhadap adanya kritikan orang lain atau pada saat ditertawakan orang lain. Orang Jepang merasakan malu apabila mereka dikritik oleh orang lain atau membayangkan dirinya seakan diperolokan orang lain. Budaya malu menuntut masyarakat untuk berperilaku baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Budaya malu ini sangat berperan dalam kehidupan orang Jepang dan sangat mempengaruhi karakteristik masyarakatnya. Malu dapat mendorong seseorang untuk bertingkah laku sesuai dengan perannya sehingga orang Jepang akan peka terhadap segala penilaian dirinya. Budaya malu ini menjadi dasar bagi masyarakat Jepang untuk menjalankan hidupnya yang juga merupakan karakter dari disiplin, sehingga jika mereka tidak disiplin maka mereka akan mendapatkan rasa malu bagi dirinya sendiri di mata masyarakat. Untuk itu, masyarakat Jepang akan berusaha untuk memenuhi perannya sesuai tuntutan masyarakat di sekitarnya terhadap dirinya.

Rasa malu berperan sebagai sanksi utama yang mendorong orang untuk menyesali tindakan-tindakan yang dianggap melanggar norma sosial di Jepang. Penyesalan ini bisa sangat mendalam dan sulit untuk diredakan, tidak seperti rasa bersalah yang dapat diatasi melalui pengakuan atau penebusan. Masyarakat Jepang memiliki dua konsep budaya malu yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk setiap tindakan yang dilakukan yaitu *kouchi* (malu yang bersifat umum) dan *shichi* (malu yang bersifat khusus).

2.2.1. *Kouchi* (こうち) atau malu umum

Malu adalah suatu reaksi psikologis yang muncul sebagai tanggapan terhadap rangsangan, baik yang berasal dari luar diri individu dan dari dalam diri individu itu sendiri. Dalam bahasa Jepang, rangsangan yang berasal dari luar diri orang yang bersangkutan disebut bersifat *gaimenteki* sedangkan yang berasal dari dalam diri sendiri disebut bersifat *naimenteki*.

Rasa malu adalah reaksi terhadap kritik yang dilancarkan orang lain. Perasaan malu muncul ketika seseorang secara terbuka diperolokkan dan ditolak, atau bahkan ketika mereka membayangkan diri mereka diperlakukan dengan cara tersebut. Rasa malu menjadi sebuah sanksi yang kuat dalam kedua situasi tersebut. Namun, penting untuk dicatat bahwa rasa malu ini memerlukan adanya pihak yang memberikan kritik atau paling tidak adanya imajinasi tentang penerimaan kritik dari orang lain (Ruth Benedict, 1982:233).

Rasa malu dalam budaya Jepang mengacu pada penilaian masyarakat secara umum terhadap tindakan individu. Masyarakat Jepang mengukur tindakan mereka berdasarkan apakah suatu tindakan akan menimbulkan rasa malu atau tidak. Jika memang ada potensi untuk menimbulkan malu, mereka akan berusaha untuk menghindari tindakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa bagi orang Jepang, standar untuk menilai baik atau buruknya suatu tindakan individu adalah malu dan pihak yang menilainya adalah masyarakat dan diri sendiri, bukan

keberadaan Tuhan. Hal ini didefinisikan sebagai budaya malu umum (*kouchi*).

Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa orang Jepang cenderung lebih mempertimbangkan pandangan dari masyarakat (mengarah keluar) daripada memfokuskan pada diri mereka sendiri. Sifat mengarah keluar inilah yang dalam bahasa Jepang disebut dengan istilah *gaimenteki* dan sifat *gaimenteki* (mengarah keluar) ini merupakan suatu ciri dari budaya malu. Rasa malu muncul karena ketidakmampuan untuk membalas budi dari orang lain, yang dikenal sebagai konsep kebaikan atau "on", yang terdiri dari *giri* (mengabdikan memikirkan untung rugi) dan *gimu* (pembalasan kebaikan dengan setulus hati). Selain itu, malu juga dapat muncul sebagai akibat dari penilaian negatif dari pihak lain, seperti sindiran, kritikan, atau cemoohan.

Ruth Benedict (1982:105) juga menjelaskan bahwa malu akan muncul jika seseorang tidak mampu menjalankan kewajibannya dengan baik. Oleh sebab itu, bangsa Jepang memiliki banyak kata yang artinya kewajiban dan kewajiban itu mencakup utang seseorang dari yang paling besar sampai yang paling kecil, yaitu *on*. *On* berarti suatu hutang atau suatu beban yang harus ia pikul sebaik mungkin.

2.2.2. *Shichi* (しち) atau malu khusus

Rasa malu akan timbul ketika seseorang menerima kritik dari orang lain. Namun, rasa malu juga dapat timbul ketika mereka menerima pujian. Seperti yang dikatakan Sakuta dalam Raphaela Dwianto (1991:14), kita merasa malu hanya ketika kita dihadapkan pada penolakan dari orang lain. Baik itu merupakan penolakan maupun pujian, pada saat kita mendapat perhatian khusus dari orang lain pun, kita akan merasa malu.

Berdasarkan pernyataan Sakuta, dapat disimpulkan bahwa rasa malu dalam budaya Jepang tidak hanya dipengaruhi oleh kritikan dan tertawaan dari orang lain. Konsep yang lebih dapat mengungkapkan pemikiran malu

dalam diri orang Jepang adalah saat seseorang mendapatkan perhatian khusus dari orang lain, termasuk penerimaan penilaian positif seperti pujian dan sanjungan. Jadi, budaya malu tidak hanya terbatas pada balas budi atau kritikan, sindiran, dan cemoohan dari orang lain. Perhatian berupa pujian dan sanjungan pun dapat mempengaruhi ada atau tidaknya rasa malu dalam diri seseorang. Budaya malu seperti ini disebut dengan malu khusus (*shichi*), yaitu malu yang bertolak ukur pada diri sendiri (*naimenteki*), dan tidak mengacu pada penilaian dari pihak lain (*gaimenteki*).

Munculnya *shichi* atau malu khusus dalam diri seseorang disebabkan oleh dua faktor yang berasal dari dalam individu tersebut, yaitu *Shikou no Kuichigai* dan *Yuretsu Kijun*. *Shikou no Kuichigai* ialah salah pengertian atau salah paham dan merupakan faktor yang muncul dari dalam diri orang yang bersangkutan.

Sedangkan *Yuretsu Kijun* adalah merupakan standarisasi yang digunakan oleh orang Jepang untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain, yaitu *standard superior* (makna yang menyatakan lebih baik daripada orang lain) dan *standard inferior* (makna kurang atau lebih rendah dibandingkan orang lain).

2.3 . Awal Mula Budaya Malu

Budaya Malu (恥の文化) adalah karakteristik dan sikap yang khas dari Bangsa Timur/Asia, dan dianggap sebagai aspek moral yang mendasari hati nurani. Dasar filsafah hidup orang Jepang terinspirasi oleh Konfusianisme, sebuah filsafah kuno yang berasal dari China, yang telah diadopsi secara luas oleh para pendidik terkemuka di Jepang sejak era Edo sekitar 1600an. Sampai kinipun, masyarakat Jepang masih sangat menghargai konsep moral dan *rinri* 倫理 (bertata-krama), yang merupakan akar dari ajaran Konfusianisme yang telah diadaptasi dari China. Prinsip-prinsip *rinri* ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan orang Jepang, termasuk dalam cara mereka berbisnis, bekerja

untuk menghidupi keluarga, dan bahkan dalam pelayanan publik. Nilai-nilai rinri menuntut setiap individu untuk mengutamakan tanggung jawab sosial mereka dalam segala hal yang mereka lakukan.

Menurut Sakuta, budaya malu masyarakat Jepang telah muncul sejak periode Yayoi. Pemahaman konsep malu pada era Yayoi menjelaskan bahwa pada masyarakat bertani, seorang individu tidak mempunyai arti jika terpisah dari komunitasnya (Sakuta, 1991: 42). Budaya malu berkembang pesat pada saat pemerintahan Tokugawa, tepatnya pada zaman Samurai. Didalam tradisi Samurai terdapat istilah *Junshi* (mati mengikuti tuannya), salah satu legendanya ialah peristiwa bunuh diri 47 ronin. Mereka bunuh diri bersama di depan makam tuannya karena merasa malu tak sanggup hidup untuk membalas budi baik tuannya. Mempertahankan diri, membela tuannya, menegakkan keadilan dan penebusan rasa malu merupakan kematian terhormat bagi kaum Samurai (Wulandari, 2006:15).

Budaya malu ini merupakan turunan budaya Samurai yang bernama Bushido. Jurnal Eiko Ikigami juga menjelaskan bahwa dalam budaya Samurai terdiri dari Na (nama), Meiyo (kehormatan), Haji (malu), Chijyoku (malu), Iji (bangga), dan Mengoku (wajah) sebagai integritas terhadap martabat dan prinsip hidup warga negara Jepang. Warisan budaya Samurai ini terus berlanjut hingga era modern, mencerminkan tekad untuk menjaga integritas martabat dan prinsip hidup di tengah masyarakat Jepang. Kehormatan dan budaya malu pada masa samurai tercermin pada tradisi *harakiri* (bunuh diri dengan menusukkan pisau ke perut). Tindakan harakiri ini dilakukan untuk menjaga kehormatan keluarga mereka dan sebagai cara yang terhormat untuk menghindari malu yang berkelanjutan. Jadi budaya malu ini sudah mulai muncul dari masa Samurai atau Bushi dan turun ke masa sekarang. <https://senjahari.com/2021/07/31/budaya-malu-dalam-budaya-jepang/>

2.4 . Hal-hal Penyebab Timbulnya Budaya Malu

1. Melanggar Norma

Norma yang ada di masyarakat Jepang itu sangat beragam, mulai dari norma sosial hingga norma umum. Semua norma ini tidak boleh dilanggar karena akan mendatangkan rasa malu jika melakukannya. Misalnya, jika seseorang mengotori lingkungan atau membuang sampah sembarangan itu dianggap aib. Hal seperti ini menunjukkan bahwa orang tersebut tidak bertanggung jawab dan harus malu atas kesalahannya.

2. Bermalas-malasan

Tidak ada toleransi bagi seseorang yang suka bermalas-malasan di Jepang. Sesuai dengan budaya malu, etos kerja Jepang yang kuat bukanlah untuk orang yang malas. Setiap orang harus bekerja keras, produktif dan loyal dengan integritas dan memiliki kedisilinan yang tinggi.

3. Tidak Disiplin

Karena sikap disiplin sudah diajarkan sejak kecil, di Jepang orang yang tidak disiplin dianggap memalukan. Misalnya, seorang mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu atau seorang karyawan yang sering terlambat masuk kerja itu dianggap hal yang memalukan. Tidak ada tempat untuk berbagai alasan, karena semuanya sudah seharusnya bisa direncanakan dan diperhitungkan dengan baik.

4. Berbuat Tidak Jujur

Sikap tidak jujur di Jepang merupakan suatu sikap yang sangat memalukan. Contohnya seperti korupsi. Pejabat negara yang melakukan korupsi sangatlah memalukan di Jepang. Jika dia terbukti melakukan korupsi, dia akan menerima sanksi hukum dan juga sanksi sosial yang berat. Sehingga ia akan merasa malu dengan tindakan yang telah ia lakukan. Ini tidak seperti di Indonesia yang melihat korupsi hanya sebagai masalah biasa yang menyebabkan para pelakunya tidak jera dengan tindakan tersebut.

5. Gagal Mencapai Tujuan

Bagi masyarakat Jepang, sangatlah memalukan bagi seseorang yang telah dipercayakan sesuatu tetapi tidak dapat memenuhinya atau mengerjakannya dengan baik. Contohnya seperti para pejabat yang tidak bisa memenuhi janjinya sering kali berujung pada pengunduran diri dan pengembalian gaji. Tidak mampu mencapai tujuan berarti tidak dapat mengemban amanah karena tidak adanya kemampuan diri. Rasa malu dari hal ini sangat besar.

2.5 . Kebiasaan Tepat Waktu pada Masyarakat Jepang

Jepang dikenal sebagai negara dengan tingkat disiplin warganya yang tinggi. Kedisiplinan orang-orang Jepang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah penggunaan waktu. Budaya tepat waktu di Jepang telah menjadi ciri khas yang terkenal di seluruh dunia. Tepat waktu adalah patokan sopan santun, dan telah ditanamkan sejak kecil. Waktu adalah segalanya bagi orang Jepang.

Pentingnya waktu di Jepang juga tercermin dalam propaganda yang menyatakan "Waktu adalah uang" dan semangat nasionalisme, yang menekankan pentingnya tepat waktu sebagai tanda penghormatan terhadap orang lain. Budaya ini telah membentuk masyarakat Jepang menjadi disiplin dalam menghargai waktu. Orang Jepang sangat menghargai waktu, sehingga keterlambatan sekecil apapun dapat dianggap sebagai masalah serius di negara ini. Oleh karena itu, setiap kegiatan diusahakan dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Mereka menggunakan waktu sesuai peruntukannya. Mereka akan berusaha memaksimalkan waktu yang ada untuk melakukan hal-hal yang dapat menunjang kesuksesannya. Dengan menepati waktu, orang Jepang menjadi tidak suka menunda-nunda pekerjaan.

Masyarakat Jepang memandang tepat waktu sebagai bentuk penghargaan terhadap waktu orang lain dan menunjukkan rasa hormat terhadap mereka. Hal ini tercermin dalam norma-norma sosial yang mengharapkan individu untuk tiba beberapa menit sebelum waktu yang telah ditentukan. Tepat waktu juga menunjukkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan dedikasi terhadap tugas atau

komitmen yang dijalankan. Sedangkan terlambat dianggap kurang sopan dan dapat dianggap mengganggu orang lain.

Budaya tepat waktu juga tercermin dalam sistem transportasi Jepang yang sangat efisien dan terkenal dengan ketepatan waktu yang tinggi Kereta api Shinkansen, misalnya, terkenal karena jarang sekali terlambat dan mengikuti jadwal dengan sangat ketat. Masyarakat Jepang sangat mengandalkan transportasi publik dan mempercayai bahwa mereka dapat mengandalkan waktu kedatangan yang terjadwal dengan akurasi tinggi.

Budaya tepat waktu mencerminkan nilai-nilai profesionalisme dan integritas di dalam konteks bisnis. Keterlambatan dalam pertemuan bisnis dianggap tidak hormat dan dapat merusak reputasi seseorang karena mencerminkan kurangnya tanggung jawab dan tidak profesional. Kepercayaan terhadap kemampuan seseorang untuk tiba tepat waktu dianggap sebagai indikator keseriusan dan kualitas kerja.

Secara keseluruhan, budaya tepat waktu di Jepang memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan dihormati secara luas oleh masyarakat. Beberapa faktor yang mendasari budaya tepat waktu di Jepang adalah nilai-nilai seperti kerja keras, disiplin, rasa tanggung jawab, dan penghormatan terhadap harmoni sosial. Selain itu, infrastruktur transportasi yang baik, seperti jaringan kereta api yang canggih, juga memainkan peran penting dalam menjaga ketepatanwaktuan.

2.6 . Sejarah Tepat Waktu Jepang

Dibalik budaya tepat waktu Jepang yang sangat terkenal saat ini, ternyata Jepang pernah berada di masa “jam karet” atau tidak tepat waktu. Mereka menganggap terlambat dan membuat orang lain menunggu adalah hal yang biasa. Susy Ong (2017), dalam buku yang berjudul *Seikatsu Kaizen* memaparkan bahwa datang tepat waktu adalah hal yang langka di Jepang saat itu.

Hal ini diperkuat berdasarkan penelitian yang dilakukan Takehiko Hashimoto dari Universitas Tokyo, yang melakukan penelitian dengan mempelajari catatan seorang Belanda, Willem Huysen van Kattendyke, seorang perwira angkatan laut Belanda yang datang ke Jepang sebagai instruktur di Pusat Pelatihan Angkatan Laut Nagasaki pada tahun 1850-an. Dalam catatannya, Kattendyke menggambarkan bagaimana sistem waktu Jepang pada saat itu serta bagaimana masyarakat Jepang yang sopan dan sederhana. <https://www.nippon.com/en/column/g00584/>

“The idleness of the Japanese is quite astonishing.”

(William van Kattendyke)

Yang artinya :

“Kemalasan orang Jepang cukup mencengangkan.”

Buku hariannya mencatat kesan-kesan yang menjungkirbalikkan reputasi Jepang sebagai orang yang tepat waktu yang berdedikasi pada pekerjaan mereka. Kattendyke mengeluhkan perilaku para pekerja yang dianggap tidak tepat waktu. Dia memberikan contoh bahwa beberapa perlengkapan untuk perbaikan kapal tidak tiba pada tanggal yang ditentukan, seringkali terlambat, dan ada yang sering tidak masuk bekerja. Insinyur asing yang datang ke Jepang pada akhir abad ke-19 juga mengalami keluhan yang serupa. Mereka juga merasakan kejengkelan yang sama terhadap kebiasaan bangsa Jepang yang tidak menghargai waktu di masa itu.

Masa ini merupakan fase transisi Jepang dari Keshogunan Tokugawa ke Restorasi Meiji dimana pada Restorasi ini Jepang mulai membuka diri untuk dunia sehingga mulai menerima dan mempelajari ilmu – ilmu dari Barat termasuk tentang disiplin waktu (Hashimoto, 2008 : 18).

Para petinggi Pemerintahan Jepang dipimpin oleh negarawan Iwakura Tomomi melakukan kunjungan ke negara-negara barat seperti Amerika Serikat, dan 11 negara di Eropa pada tahun 1871-1873 dipimpin oleh negarawan Iwakura Tomomi. Delegasi Jepang tersebut terkesan dengan tingkat

kedisiplinan masyarakat barat yang mereka temui. Kesimpulan dari kunjungan ini adalah Jepang masih sangat tertinggal dalam bidang industri dan kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu Jepang harus mencontoh negara barat jika ingin maju.

Merespon kunjungan tersebut, pemerintah Jepang bekerja sama dengan masyarakat kelas menengah untuk melaksanakan serangkaian kampanye nasional dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jepang. Kampanye ini bertujuan untuk mengubah perilaku dari sikap malas, santai, tidak disiplin, ceroboh, apatis, dan boros menjadi sikap rajin, hemat, disiplin, teliti, dan antusias untuk mencapai kemajuan.

Restorasi Meiji adalah era yang mengubah segala-galanya di Jepang. Masyarakat Jepang mulai mengembangkan budaya menghargai waktu pada masa ini. Selama era ini diterapkan beberapa hal seperti sistem pendidikan, penanaman moral, dan program pemerintah yang bertujuan membentuk masyarakat Jepang menjadi lebih disiplin terhadap waktu. Sebuah studi kolaboratif dan interdisipliner yang diselenggarakan untuk tahun akademik 1999/2000 di Pusat Internasional di Kyoto, dalam judul makalah Chikoku no Tanjō (Kelahiran Keterlambatan) mengemukakan bahwa pada masa Meiji, terutama sejak awal periode Meiji, ketepatan waktu telah diterapkan di berbagai institusi seperti perusahaan kereta api, pabrik dan sekolah. Sistem pendidikan di Departemen Pendidikan pun mengeluarkan Seito Kokoroe (Arahan ke Anak-anak Sekolah Dasar) pada tahun 1873 dengan isi sebagai berikut:

“Make sure that you are at school ten minutes before the start of class every day. If you are late for school, do not enter the classroom without permission; explain the reason for your tardiness and wait for your teacher’s instructions.”

(Nishimoto, 2002 : 123)

Artinya : Pastikan Anda berada di sekolah sepuluh menit sebelum dimulainya kelas setiap hari. Jika Anda terlambat ke sekolah, jangan

memasuki ruang kelas tanpa izin; jelaskan alasan keterlambatan Anda dan tunggu guru Anda.

Arahan dari Departemen Pendidikan Jepang mengharuskan agar siswa tiba 10 menit sebelum pelajaran dimulai setiap harinya, dan jika tidak mereka akan menerima hukuman atas keterlambatan dari guru mereka. Langkah ini berperan dalam mengajarkan konsep ketepatan waktu pada generasi baru. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hashimoto dalam sebuah catatan orang Belanda dapat disimpulkan bahwa prinsip disiplin sudah diterapkan di Jepang sejak waktu yang lama hingga saat ini, dan meskipun era telah berganti, budaya disiplin tetap terjaga dalam perilaku masyarakat Jepang. Orang Jepang masa kini menanamkan budaya disiplin sejak dini yang dibiasakan oleh orang tua di rumah mereka. Sekolah dasar di Jepang pun memberikan fokus utama pembelajaran pada budaya disiplin. Hal ini lah yang menjadi dasar dari sumber daya manusia berkualitas dari Jepang.

Kementerian Pendidikan Jepang kemudian mengkampanyekan reformasi pola hidup dengan menggelar pameran Life Improvement di Museum Pendidikan Tokyo pada bulan November 1919. Pameran tersebut menampilkan poster dan foto-foto yang mengangkat tema pola hidup yang efisien, meliputi aspek sandang, pangan, perumahan, dan tata krama dalam kehidupan bermasyarakat. Pameran ini mendapatkan sambutan yang sangat positif dari warga Tokyo. Sebagai hasil dari pameran ini, terbentuklah Better Life Union, sebuah perkumpulan yang berkomitmen untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dengan beberapa agenda, seperti menghargai waktu (tepat waktu), memperbaiki tata krama, menghilangkan kebiasaan gengsi, meninggalkan perilaku yang mengganggu kesehatan dan kebersihan umum, serta menabung.

Sekolah, pabrik, dan kereta api, di mana ketepatan waktu diberlakukan dengan ketat, adalah institusi utama yang memelopori perubahan sosial ini. Sekitar waktu itu, jam tangan menjadi barang yang populer, dan konsep waktu 24 jam menjadi akrab bagi warga biasa. Menurut peneliti waktu Ichiro Oda, pada saat itulah orang Jepang menyadari bahwa "waktu adalah uang".

Ketepatan waktu dilembagakan dalam berbagai propaganda negara pada 1920-an. Langkah nyata lainnya ditempuh dengan membentuk opini publik mengenai pentingnya reformasi pola hidup. Surat kabar, buku, majalah-majalah didorong untuk membangun kesadaran publik soal kedisiplinan. Berbagai poster soal ketepatan dan penghematan waktu disebar. Pada pameran waktu, banyak poster ditampilkan yang menunjukkan cara mengukur waktu yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari dan menyarankan cara agar penonton dapat menghemat waktu.



Gambar 2. 1. Waktu Menata Rambut Wanita

Sumber : Japanese Clocks and the History of Punctuality in Modern Japan.

International Journal. 123-133

Gambar 2.1 merupakan poster tentang cara menghemat waktu dalam menata rambut wanita di Jepang pada saat itu. Waktu bervariasi dari 5 menit untuk membuat gaya rambut standar hingga 55 menit untuk mengenakan gaya rambut acara formal.

Sejak 1956, pemerintah dan tokoh masyarakat memulai kampanye nasional untuk meningkatkan moral publik dengan mengajak rakyat agar berperilaku sesuai dengan standar masyarakat yang beradab. Berkat konsistensi dalam kampanye ini, masyarakat Jepang telah mencapai hasil yang positif. Saat ini, mereka menjadi contoh yang diacu dalam hal ketepatan waktu.

Keberhasilan Jepang dalam mereformasi pola hidup seperti tepat waktu karena peran pemerintah dan kelas menengah yang bersama-sama mengkampanyekan hal tersebut. Imbauan-imbauan tentang kedisiplinan disebarluaskan ke seluruh penjuru negara, bahkan hingga ke pelosok-pelosok, melalui poster-poster yang menyindir kebiasaan telat sebagai hal yang memalukan. Meskipun memerlukan waktu puluhan tahun, upaya untuk mengubah pola hidup masyarakat Jepang berhasil karena dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Jadi seiring berjalannya waktu, kesadaran akan konsekuensi ketepatan waktu semakin meningkat. Namun, tidak sekadar mengimbau, tetapi juga ada penghargaan yang diberikan. Karena sudah tertanam sejak masa sekolah, hal tersebut terbawa hingga dunia kerja. Perusahaan atau instansi pemerintah akan memberikan apresiasi penghargaan kepada karyawan yang secara konsisten mematuhi ketepatan waktu. Reputasi dapat dengan mudah tercoreng dengan terlambat di Jepang. Catatan keterlambatan pada siswa Jepang bahkan dapat berdampak buruk pada penilaian universitas. Hukuman sosial turun temurun semacam itu, telah berhasil memastikan bahwa nilai ketepatan waktu terus tertanam dalam masyarakat Jepang di era modern.